



Hambatan Akses Turki ke Uni Eropa

Yozar Qohari Bil Ikhsan

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisipundip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Based on political term in the Copenhagen Criteria, European Commission decide the requirements for Accession to European Union which to guarantee and protect Democracy, Human Rights and Minority Rights. Those are supported by the Liberalism perspective on international relation study which explains that regional cooperation and international cooperation can be done if the state can guarantee the enforcement of Democracy and protect the Human Rights included Minority Rights. This research purpose is to find the obstacles of the Turkey accession to European Union using Descriptive-Qualitative analysis method and Liberalism approach. This research result argues that Turkey has done many efforts for qualifying up the requirements to get the Accession to European Union immediately. But in 2010-2016 the European Union appraised Turkey hasn't done the enforcement of Democracy, Human Rights, and Minority Rights fully yet. Then Turkey accession efforts to the European Union got an obstacle.

Keywords : *Accession, European Union, Regional Cooperation, Turkey, Copenhagen Criteria*

PENDAHULUAN

Pada tahun 1993 dengan diratifikasinya perjanjian Maashtich, Masyarakat Eropa berubah nama menjadi Uni Eropa. Hal ini bertujuan untuk mempertegas identitas Eropa atas negara anggotanya, juga memperkokoh integrasi Eropa (Dastanta, 2009 : 6). Uni Eropa memiliki tiga pilar utama, yakni : kerangka kerja masyarakat Eropa, kerjasama kebijakan luar negeri, dan kerjasama dalam bidang hukum serta masalah-masalah dalam negeri (Dastanta, 2009). Pesatnya perkembangan yang dicapai oleh Uni Eropa didukung oleh stabilitas ekonomi dan politik. Keberhasilan Uni Eropa dalam berbagai bidang, terutama ekonomi dan politik menjadi daya tarik yang besar bagi banyak negara. Mendapatkan predikat sebagai anggota Uni Eropa diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi negara anggota. Begitu juga Turki berharap jika tergabung menjadi anggota Uni Eropa (aksesi) bisa membawa kesejahteraan bagi negaranya (anonim, 2015). Uni Eropa memiliki Kriteria yang harus dipenuhi oleh negara-negara yang ingin bergabung menjadi anggota, disebut Kriteria Kopenhagen. Kriteria akses atau kriteria Kopenhagen yang dirumuskan oleh Dewan Eropa di Kopenhagen sejak tahun 1993, adalah syarat-syarat penting yang harus dipenuhi oleh negara-negara kandidat untuk menjadi negara anggota, yaitu :

Pertama, Kriteria Politik : stabilitas lembaga-lembaga yang menjamin demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia dan penghormatan serta perlindungan terhadap minoritas

Kedua, Kriteria Ekonomi : adanya ekonomi pasar dengan kapasitas yang memungkinkan dalam menghadapi tekanan kompetitif dan tekanan pasar Uni Eropa;

Ketiga, Kriteria Acquis : berkomitmen terhadap hak dan kewajiban yang mengikat semua negara anggota Uni Eropa, diantaranya bersedia taat kepada Undang-Undang Uni Eropa dan menjadikan hukum Uni Eropa sebagai bagian dari undang-undang nasional mereka. (European Commission, 2018).

Menurut persyaratan tersebut, Turki sangat memenuhi persyaratan untuk menjadi negara anggota Uni Eropa dilihat dari segi ekonomi dan politik. Menurut publikasi Pemerintah Inggris (UK Foreign and Commonwealth Office, 2014), Turki adalah Negara dengan ekonomi pasar terbesar nomor 16 di dunia dan ekonomi terbesar ke-6 jika dimasukkan di Eropa. Pertumbuhan GDP-nya termasuk yang tercepat, yaitu sebesar 8,8% pada 2011, 2,2% pada 2012 dan 4% pada tahun 2013. Tingkat pertumbuhan rata-rata dalam satu dekade terakhir adalah 5%, tercepat di antara negara-negara OECD, yang tumbuh rata-rata hanya 1,7%. GDP per kapita meningkat hampir tiga kali lipat sejak tahun 2002, dari \$ 3.500 menjadi \$ 10.815 pada tahun 2013. Defisit anggaran Turki pada tahun 2012 hanya sebesar 2 % dari GDP, salah satu yang terendah jika dibandingkan dengan negara-negara Uni-Eropa. Tidak hanya itu, Istanbul dan Ankara adalah salah satu kota terbesar di dunia dalam hal PDB, yaitu sebesar \$ 180.000.000.000 melampaui banyak negara Uni Eropa seperti Rumania, Hungaria, Bulgaria dan Slovenia. Tapi tetap saja kemajuan ekonomi Turki ini tidak membuatnya diterima menjadi salah satu anggota Uni Eropa.

Tidak hanya itu, dalam bidang politik sejak tahun 2003 pemerintahan Turki telah melakukan proses lebih melangkah ke depan lagi dengan melakukan reformasi demokrasi dengan meliberalisasikan perpolitikan di Turki. Didukung pula oleh Partai yang berkuasa, yakni Partai Adalet ve Kalkinme Partisi dengan menggunakan kekuatannya di Parlemen berupaya untuk mempercepat proses akses Turki ke Uni Eropa. Melihat kondisi ini, Komisioner dari Komisi perluasan Uni Eropa memberikan sambutan yang positif, demikian juga dari pemerintahan Yunani, Inggris dan Italia (Nayana, 2013). Pemerintah Turki berharap agar usaha yang telah dilakukan Turki selama ini mampu menjadi pertimbangan utama para petinggi Uni Eropa sehingga bersedia membuka dengan segera negosiasi bergabungnya Turki ke Uni Eropa (Nayana, 2013). Demi terwujudnya hal tersebut, Turki telah melakukan berbagai cara. Mulai dari mendaftar sebagai negara yang ingin bergabung dengan Uni Eropa sampai me-lobby para petinggi negara-negara berpengaruh di Eropa untuk mendukungnya bergabung dengan Uni Eropa (Nayana, 2013).

Pemerintah Turki berharap agar usaha yang telah dilakukan Turki selama ini mampu menjadi pertimbangan utama para petinggi Uni Eropa sehingga bersedia membuka dengan segera negosiasi bergabungnya Turki ke Uni Eropa (Nayana, 2013). Recep Tayyip Erdogan dalam usahanya untuk membuat Turki agar bisa bergabung dengan Uni Eropa adalah mengunjungi setiap ibukota negara anggota Uni Eropa dan mendapatkan dukungan dari beberapa pemimpin di Italia, Yunani, Spanyol, Inggris dan Belgia bahkan termasuk Presiden Amerika Serikat saat itu George W. Bush, namun mendapat tanggapan yang rendah dari para pemimpin di negara Jerman dan Perancis (Nayana, 2013). Melihat kemajuan yang telah dicapai oleh Turki selama ini maka Dewan Eropa ada saat itu memutuskan untuk meninjau permohonan keanggotaan Turki dalam jangka dua tahun (Nayana, 2013). Namun sampai sekarang status pengakuan keanggotaannya masih belum dikabulkan oleh komisi Uni Eropa. Sebagian menu Uni Eropa akhirnya meminta pengertian dan kesabaran Turki atas permohonannya menjadi anggota baru Uni Eropa. Turki harus mengerti bahwa tidak ada jalan pintas (Dastanta, 2009). Dengan menggunakan perspektif Liberalisme, penelitian ini berusaha menjelaskan mengapa akses Turki ke Uni Eropa mengalami hambatan. Menurut perspektif Liberalisme, hambatan dalam kerjasama internasional/regional dapat terjadi karena permasalahan demokrasi, hak asasi manusia termasuk hak-hak kaum minoritas. Sejak tahun 2010-2016, Uni Eropa menemukan berbagai permasalahan demokrasi dan hak asasi manusia

terkait dengan upaya akses Turki ke Uni Eropa yang menghambat akses Turki ke Uni Eropa.

PEMBAHASAN

Sejak tahun 2010-2016, Uni Eropa menemukan permasalahan demokrasi yang menghambat akses Turki ke Uni Eropa. Di sisi lain, berbagai upaya telah dilakukan oleh Turki untuk menyelesaikan permasalahan demokrasi agar segera disetujui untuk bergabung ke dalam anggota Uni Eropa. Pada tahun 2010-2016 Turki berupaya untuk memenuhi kriteria ini agar segera diterima dalam aksesnya ke Uni Eropa. Menurut publikasi Turkey Progress Report 2010-2016, dalam hal demokrasi, Turki berupaya : membuka akses peradilan kepada publik melalui sebuah website, mengurangi kewenangan dan pengaruh Menteri Kehakiman sehingga diharapkan mampu menjamin peradilan yang independen tanpa banyak intervensi dari otoritas Turki, memberikan hak bagi individu untuk mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi, melakukan Strategi Anti Korupsi dengan mengawasi pembiayaan partai politik termasuk sumber pendanaan kampanye, membentuk ombudsman yang bertugas menerima keluhan korupsi.

Namun Uni Eropa menemukan berbagai permasalahan dalam hal demokrasi yang menghambat akses Turki ke Uni Eropa. Menurut publikasi Turkey Progress Report 2010-2016, permasalahan dalam hal demokrasi yang menghambat akses Turki ke Uni Eropa, yaitu : kurangnya keseimbangan gender dalam parlemen Turki, sehingga Uni Eropa menilai bahwa perempuan kurang terwakili di parlemen Turki, adanya serangan teroris saat pemilu legislatif yang menewaskan aparat keamanan, peran pemerintah daerah yang belum efektif dalam upaya akses Turki ke Uni Eropa karena budget pemerintah daerah terlalu sedikit jika dibandingkan negara anggota Uni Eropa, efisiensi peradilan Turki yang belum memadai dengan adanya tunggakan-tunggakan kasus di pengadilan, membiarkan kekebalan hukum terhadap anggota parlemen dan pejabat publik dalam kasus korupsi sehingga Uni Eropa menilai Turki belum menjamin upaya memerangi korupsi, permasalahan terorisme yang mengancam hak hidup manusia akibat konflik Turki dengan kelompok teroris PKK (Partai Pekerja Kurdi), kurangnya keseimbangan gender dalam profesi hakim dan jaksa dalam sistem peradilan Turki sehingga Uni Eropa menilai perempuan kurang terwakili dalam profesi hakim dan jaksa dalam sistem peradilan Turki, belum mengakomodasi bahasa Kurdi dalam pelayanan publik sehingga Uni Eropa menilai Turki belum menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas terhadap etnis minoritas Kurdi. Sehingga, selama tahun 2010-2016 Uni Eropa menilai Turki belum mampu sepenuhnya dalam menjamin demokrasi dan hak minoritas sehingga upaya aksesnya ke Uni Eropa mengalami hambatan.

Sejak tahun 2010-2016, Uni Eropa menemukan permasalahan hak asasi manusia yang menghambat akses Turki ke Uni Eropa. Di sisi lain, berbagai upaya telah dilakukan oleh Turki untuk menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia agar segera disetujui untuk bergabung ke dalam anggota Uni Eropa. Pada tahun 2010-2016 Turki berupaya untuk memenuhi kriteria ini agar segera diterima dalam aksesnya ke Uni Eropa. Menurut publikasi Turkey Progress Report 2010-2016, dalam hak asasi manusia, Turki berupaya : menjamin hak-hak penyandang cacat dalam bekerja dan mendapatkan pekerjaan sehingga jumlah pengangguran di kalangan penyandang cacat lebih sedikit dari rata-rata negara anggota Uni Eropa, melakukan pelatihan tentang Hak Asasi Manusia terhadap para sipir di rumah tahanan/penjara yang diharapkan mampu mengendalikan situasi jika setiap saat terjadi kekacauan agar tidak terjadi pelanggaran HAM.

Namun Uni Eropa menemukan berbagai permasalahan hak asasi manusia yang menghambat akses Turki ke Uni Eropa. Menurut publikasi Turkey Progress Report 2010-2016, permasalahan hak asasi manusia yang menghambat akses Turki ke Uni Eropa, yaitu : diskriminasi dan stereotip negatif terhadap LGBT yang terus berlanjut ditambah lagi Turki

selalu menempati peringkat terendah dibandingkan dengan 28 negara anggota Uni Eropa dan negara kandidat anggota Uni Eropa dalam hal penghormatan terhadap hak asasi LGBT pada tahun 2010-2016 menurut publikasi Rainbow Europe tahun 2010-2016. Permasalahan dalam kebebasan pers berupa tuntutan hukum, penahanan, dan hukuman pengadilan yang menargetkan wartawan dan pekerja media di Turki yang menjadikannya menjadi negara penjara terbesar bagi wartawan, ditambah lagi Turki selalu menempati peringkat terendah dibandingkan dengan 28 negara anggota Uni Eropa dan negara kandidat anggota Uni Eropa dalam hal kebebasan pers pada tahun 2010-2016 menurut publikasi World Press Freedom Index tahun 2010-2016. Maraknya pemblokiran web/media tanpa putusan pengadilan selama tahun 2010-2016, Turki melakukan pemblokiran web/media terbanyak dibandingkan 28 negara anggota Uni Eropa pada tahun 2014-2018 menurut publikasi Index of Censorship tahun 2019. Diskriminasi dalam kebebasan beragama berupa penolakan perizinan pembangunan tempat ibadah kelompok minoritas agama alevi, ditambah lagi Turki selalu menempati peringkat terendah dalam hal kebebasan beragama dibandingkan 28 negara anggota Uni Eropa dan negara kandidat anggota Uni Eropa pada tahun 2010-2016 menurut publikasi Human Freedom Index tahun 2010-2016.

Selama tahun 2010-2016 Uni Eropa menilai Turki belum mampu sepenuhnya dalam menjamin demokrasi, hak asasi manusia dan hak-hak minoritas sehingga upaya aksesinya ke Uni Eropa mengalami hambatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Kriteria Kopenhagen dalam hal politik, komisi Uni Eropa menetapkan persyaratan untuk akses ke Uni Eropa, yaitu adanya jaminan dan perlindungan terhadap : Demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan adanya penghormatan dan perlindungan terhadap minoritas. Menurut perspektif Liberalisme, hambatan dalam kerjasama internasional/regional dapat terjadi karena permasalahan demokrasi, hak asasi manusia termasuk hak-hak kaum minoritas. Uni Eropa menemukan berbagai permasalahan demokrasi dan HAM selama tahun 2010-2016 di Turki, sehingga akses Turki ke Uni Eropa mengalami hambatan. Selama tahun 2010-2016 Uni Eropa menilai Turki belum mampu sepenuhnya dalam menjamin demokrasi, hak asasi manusia dan hak-hak minoritas sehingga upaya aksesinya ke Uni Eropa mengalami hambatan.

REFERENSI

- Anonim.(2015).<http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t59987.pdf>
- Dastanta, Fany. (2009). IMPLIKASI PENERIMAAN SIPRUS DALAM KEANGGOTAAN UNI EROPA TERHADAP PENERIMAAN TURKI DALAM KEANGGOTAAN UNI EROPA. Library UI. <http://lib.ui.ac.id/>
- European Commission. (2018). European Commission Official Web. <https://ec.europa.eu/>
- Nayana, Fitri. (2013). KEBIJAKAN LUAR NEGERI TURKI DENGAN UNI EROPA PADA MASA PEMERINTAHAN RECEP TAYYIP ERDOGAN (TAHUN 2002-2010). Universitas Riau. <http://repository.unri.ac.id/>
- Human Freedom Index. (2015). The Human Freedom Index 2015 : A Global Measurement of Personal, Civil, and Economic Freedom. <https://object.cato.org/>
- Human Freedom Index. (2017). The Human Freedom Index 2017 : A Global Measurement of Personal, Civil, and Economic Freedom. <https://object.cato.org/>
- Index of Censorship. (2019). Mapping Media Freedom : By the numbers May 2014-July 2018. <https://www.indexoncensorship.org/wp-content/uploads/2019/01/index-report-2018-v6-FINAL-29January2019v5.pdf>

Rainbow Europe. (2010). Legal Situation for Lesbian, Gay and Bisexual people in Europe 2010. <https://rainbow-europe.org/>

Rainbow Europe. (2011). Rainbow Europe Country Index 2011. <https://rainbow-europe.org/>

Rainbow Europe. (2012). ILGA-Europe Rainbow Map (Index) 2012. <https://rainbow-europe.org/>

Rainbow Europe. (2013). ILGA-Europe Rainbow Map (Index) May 2013. <https://rainbow-europe.org/>

Rainbow Europe. (2014). ILGA-Europe Rainbow Map (Index) May 2014. <https://rainbow-europe.org/>

Rainbow Europe. (2015). ILGA-Europe Rainbow Map (Index) May 2015. <https://rainbow-europe.org/>

Rainbow Europe. (2016). ILGA-Europe Rainbow Map (Index) May 2016. <https://rainbow-europe.org/>

Turkey Progress Report. (2011). European Commission : Neighbourhood and Enlargement. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2011/package/tr_rapport_2011_en.pdf

Turkey Progress Report. (2013). European Commission : Neighbourhood and Enlargement. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2013/package/tr_rapport_2013_en.pdf

Turkey Progress Report. (2014). European Commission : Neighbourhood and Enlargement. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2014/package/tr_rapport_2014_en.pdf

Turkey Progress Report. (2015). European Commission : Neighbourhood and Enlargement. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2015/package/tr_rapport_2015_en.pdf

Turkey Progress Report. (2016). European Commission : Neighbourhood and Enlargement. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/package/tr_rapport_2016_en.pdf

UK Foreign and Commonwealth Office. (2014). Turkey: latest killer facts about the economy. <https://www.gov.uk/government/publications/turkey-latest-killer-facts-about-the-economy/>

World Press Freedom Index. (2010). 2010 World Press Freedom Index - Country Ranking. <https://rsf.org/en/world-press-freedom-index-2010>

World Press Freedom Index. (2011). World Press Freedom Index 2011/2012. <https://rsf.org/en/world-press-freedom-index-20112012>

World Press Freedom Index. (2012). World Press Freedom Index Country Ranking 2012. <https://rsf.org/en/ranking/2012>

World Press Freedom Index. (2012a). Turkey – world’s biggest prison for journalists. <https://rsf.org/en/news/turkey-worlds-biggest-prison-journalists>

World Press Freedom Index. (2013). World Press Freedom Index 2013. <https://rsf.org/en/world-press-freedom-index-2013>

World Press Freedom Index. (2014). Biggest Rises and Falls in the 2014 World Press Freedom Index. <https://rsf.org/en/world-press-freedom-index-2014>

World Press Freedom Index. (2014a). World Press Freedom Index Country Ranking 2014. <https://rsf.org/en/ranking/2014>

World Press Freedom Index. (2015). World Press Freedom Index Country Ranking 2015. <https://rsf.org/en/ranking/2015>

World Press Freedom Index. (2016). World Press Freedom Index Country Ranking 2016. <https://rsf.org/en/ranking/2016>.